



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD TAUFIQ
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
3. NHK : 248376

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 6.686.000.000

1. Tanah Seluas 368 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 736.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.850.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 246 m2/100 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 333 m2/531.44 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 952.000.000

1. MOBIL, HONDA CIVIC SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI JEEP Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 489.000.000
3. MOBIL, TOYOTA CAMRY 2.5G A/T SEDAN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 268.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 3.254.676.277

F. HARTA LAINNYA

Rp. 850.000.000

Sub Total

Rp. 11.742.676.277

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 11.742.676.277



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.